



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN
PERATURAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/ M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama Lembaga Administrasi Negara;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);

5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Lembaga Administrasi Negara Tahun 2015-2019;

Memperhatikan

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama Lembaga Administrasi Negara sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara ini berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2015

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

AGUS DWIYANTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1107

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



RUSMA DWIYANA

LAMPIRAN I
PERATURAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA DI LINGKUNGAN LEMBAGA
ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2015

1. Instansi : Lembaga Administrasi Negara
2. Tugas : Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Fungsi :
- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang administrasi negara;
 - b. Pengkajian administrasi negara di bidang kebijakan reformasi administrasi; desentralisasi dan otonomi daerah, sistem administrasi negara, dan hukum administrasi negara;
 - c. Pengembangan inovasi administrasi negara di bidang tata pemerintahan, pelayanan publik, serta kelembagaan dan sumber daya aparatur;
 - d. Pemberian fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi negara;
 - e. Pembinaan, penjaminan mutu, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur negara;
 - f. Pembinaan jabatan fungsional tertentu yang menjadi kewenangan LAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Pengembangan kapasitas administrasi negara; dan
 - h. Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama LAN

No.	Indikator Kinerja Utama
1	Jumlah rekomendasi kebijakan administrasi negara yang menjadi wacana publik
2	Jumlah analisis kebijakan yang dihasilkan
3	Persentase alumni diklat kepemimpinan yang menerapkan inovasi/proyek perubahan
4	Persentase lembaga diklat yang akreditasinya meningkat
5	Persentase instansi pengirim mahasiswa yang puas terhadap kualitas lulusan STIA
6	Jumlah inovasi administrasi negara
	Jumlah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang memanfaatkan model inovasi administrasi negara LAN
8	Jumlah karya ilmiah di bidang Administrasi Negara yang terpublikasi di media ilmiah/publikasi nasional/internasional terakreditasi
9	SKOR SAKIP
10	OPINI BPK
11	SKOR PEGI (Pemeringkatan <i>E-Government</i> Indonesia)

5. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Utama

No.	Indikator Kinerja Utama
1	Tingkat kepuasan <i>stakeholders</i> internal atas pelayanan Sekretariat Utama
2	Persentase ketepatan penyelesaian dokumen kesekretariatan
3	Peningkatan kompetensi pegawai
4	Persentase tingkat disiplin pegawai
5	0 tini hasil •emeriksaan la•oran keuan:an
6	Skor penilaian akuntabilitas kinerja LAN
7	Rata-rata skor evaluasi SAKIP Unit Kerja
8	Persentase enyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
9	Capaian akhir pelaksanaan Aksi PPK
10	Indeks Kesiapan Penerapan <i>E-Government</i>
11	Skor Evaluasi RB

6. Indikator Kinerja Utama Biro Perencanaan, Hukum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

No.	Indikator Kinerja Utama
1	Persentase capaian penggunaan anggaran dan output kegiatan
2	Jumlah revisi an:garan
3	Tin kat kepuasanr,, lapelayanan
4	Skor penilaian akuntabilitas kinerja LAN
5	Jumlah sistem informasi yang dibangun dan dapat diakses
6	Tingkat konektivitas jaringan
7	Jumlah •ublikasi an: tersebarluaskan seba:ai informasi •ublik
8	Skor Evaluasi RB

7. Indikator Kinerja Utama Biro Umum

No.	Indikator Kinerja Utama
1	Persentase laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan Sistem Akuntansi berbasis Akrua
2	Terbayarkannya gaji dan tunjangan pegawai sesuai waktu dan ketentuan yang berlaku
3	Penyelesaian kasus dalam penerimaan CPNS
4	Trans aransi dalam enerimaan etawai
5	Ketaatan den:an •erundant-undan:an
6	Pengiriman Pejabat Struktural dalam Diklat Kepemimpinan
7	Peningkatan kompetensi pegawai
8	Inte:rasi Sistem Informasi Ke•e:awaian dan Tun an:an Kine 'a
9	Disiplin waktu pegawai
10	Penyelesaian kasus disiplin pegawai
11	Persentase pengadaan barang dan jasa yang selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan
12	Persentase tersedia dan terpeliharanya sarana, prasarana dan lingkungan kerja pegawai yang i

8. Indikator Kinerja Utama Inspektorat

No.	Indikator Kinerja Utama
1	Jumlah laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan
2	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan
3	Jumlah laporan reviu RKA K/L yang diterbitkan
4	Jumlah laporan reviu laporan keuangan
5	Rata-rata nilai evaluasi AMP
6	Opini BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan
7	Capaian akhir pelaksanaan Aksi PPK
8	Skor evaluasi RB

9. Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Kajian Kebijakan

No.	Indikator Kinerja Utama
1	Jumlah rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik
2	Jumlah karya ilmiah di bidang Administrasi Negara yang dipublikasi di media ilmiah publikasi nasional internasional
3	Jumlah norma dan kebijakan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
4	Jumlah analisis kebijakan yang dihasilkan
5	Jumlah analisis kebijakan yang dihasilkan
6	Persentase sosialisasi/promosi tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang dilaksanakan

10. Indikator Kinerja Utama Pusat Kajian Reformasi Administrasi

No.	Indikator Kinerja Utama
1	Jumlah rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik
2	Jumlah <i>policy paper/ policy brief</i> di bidang Reformasi Administrasi

11. Indikator Kinerja Utama Pusat Kajian Sistem Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara

No.	Indikator Kinerja Utama
1	Jumlah rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik
2	Jumlah <i>policy paper/ policy brief</i> di bidang Sistem dan Hukum Administrasi Negara
3	Jumlah publikasi Jurnal <i>Epicentrum</i> Sistem dan Hukum Administrasi Negara

12. Indikator Kinerja Utama Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah

No.	Indikator Kinerja Utama
1	Jumlah rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik
2	Jumlah <i>policy paper/ policy brief</i> di bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah
3	Jumlah publikasi Jurnal <i>Desentralisasi</i>

13. Indikator Kinerja Utama Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

No.	Indikator Kinerja Utama
1	Jumlah pedoman/konsep/instrumen Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
2	Jumlah Analis Kebijakan yang dihasilkan
3	Jumlah Kebijakan an dikemban kan kom etcnsin a
4	Persentase sosialisasi/promosi tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang dilaksanakan

14. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

No.	Indikator Kinerja Utama
1	Persentase Diklat Aparatur yang terselenggara sesuai standar
2	Persentase Alumni Diklat Kepemimpinan yang menerapkan inovasi/proyek perubahan
	Jumlah pedoman/konsep / instrumen Pembaharuan Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan
4	Persentase Lembaga Diklat yang akreditasinya meningkat
	Jumlah kebijakan/pedoman/instrumen Pembinaan Widyaiswara yang diterbitkan
	Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional
	Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan
	Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Diklat Prajabatan
9	Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Diklat Bahasa
10	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi kewidyaiswaraan, termasuk pemeriksaan dan penilaian DUPAK

15. Indikator Kinerja Utama Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan

No.	Indikator Kinerja Utama
1	Jumlah Diklat A aratur an. terselent!ara sesuai standar
2	Jumlah kebijakan/pedoman/konsep/instrumen pembaharuan diklat kepemimpinan dan prajabatan
3	Jumlah an terlatih
4	Jumlah Lembaga Diklat yang terakreditasi
5	Pengembangan SIDA dan Jumlah PIC an terlatih
6	Jumlah instansi yang dimonitor dan dievaluasi

16. Indikator Kinerja Utama Pusat Pembinaan Widyaiswara

No.	Indikator Kinerja Utama
1	Jumlah kebijakan/pedoman/konsep/instrumen Pembinaan Widyaiswara
2	Jumlah penyelenggaraan seminar/ sosialisasi/ rapat koordinasi kewidyaiswaraan
3	Persentase terpenuhinya permintaan fasilitasi bidang kewidyaiswaraan.
4	Jumlah pembinaan dan evaluasi widyaiswara
5	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi kewidyaiswaraan, termasuk pemeriksaan dan penilaian DUPAK
6	Persentase penanganan aduan pelayanan. administrasi kewidyaiswaraan

17. Indikator Kinerja Utama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur Nasional

No.	Indikator Kinerja Utama
1	Persentase Pemimpin Perubahan yang dihasilkan dari Diklatpim Tk. I, II, III dan IV
	Persentase lulusan Diklat Aparatur dengan predikat minimal memuaskan
3	Persentase proyek perubahan Alumni Diklatpim Tk. I yang dimanfaatkan oleh instansi
4	Tingkat kepuasan Pelayanan Kediklatan
5	Jumlah penyelenggaraan kelas <i>Academic and Presentation Skills</i>
6	Jumlah sosialisasi Pedoman LAN ECSCS Test
7	Jumlah penyelenggaraan LAN ECSCS <i>Test Preparation Class</i>
8	Jumlah Modul <i>Academic Writing and Presentation Skills</i>
9	Jumlah penyelenggaraan <i>Academic Writing and Presentation Skills</i>
10	Jumlah penyelenggaraan Diklat Bahasa 5 hari
11	Jumlah penyelenggaraan Diklat Bahasa 3 hari
12	Jumlah penyelenggaraan <i>Placement Test</i>

18. Indikator Kinerja Utama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional

No.	Indikator Kinerja Utama
1	Persentase Diklat Teknis dan Fungsional yang terselenggara sesuai standar
2	Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional
3	Persentase permintaan advokasi/fasilitasi bidang kediklatan dari instansi lain

19.Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara

No.	Indikator Kinerja Utama
1	Jumlah inovasi administrasi negara
	Jumlah <i>policy paper</i> penelaahan isu strategis bidang inovasi
3	Jumlah peserta desiminasi direktori inovasi pelayanan publik
	Jumlah promosi inovasi dan pengembangan kapasitas yang dilaksanakan
5	Jumlah Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah yang memanfaatkan inovasi administrasi negara LAN

20.Indikator Kinerja Utama Pusat Inovasi Tata Pemerintahan

No.	Indikator Kinerja Utama
1	Jumlah inovasi administrasi negara aspek tata pemerintahan
2	Jumlah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang memanfaatkan inovasi administrasi negara LAN

21.Indikator Kinerja Utama Pusat Inovasi Pelayanan Publik

No.	Indikator Kinerja Utama
1	Jumlah inovasi ady p a h masyarakat
2	Jumlah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang memanfaatkan inovasi administrasi negara LAN

22.Indikator Kinerja Utama Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumberdaya Aparatur

No.	Indikator Kinerja Utama
1	Jumlah inovasi administrasi negara aspek kelembagaan dan sumberdaya aparatur
2	Jumlah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang memanfaatkan inovasi administrasi negara LAN

23.Indikator Kinerja Utama Pusat Promosi Inovasi dan Pengembangan Kapasitas

No.	Indikator Kinerja Utama
1	Jumlah promosi inovasi dan pengembangan kapasitas
2	Jumlah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang memanfaatkan inovasi administrasi negara LAN

24. Indikator Kinerja Utama Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN

No.	Indikator Kinerja Utama
1	Jumlah rekomendasi kebijakan an: men'adi wacana •ublik
2	Jumlah karya ilmiah di bidang Administrasi Negara yang to •ublikasi di media ilmiah •ublikasi nasional internasional
3	Jumlah alumni Diklat Kepemimpinan yang menerapkan inovasi/proyek perubahan
4	Indeks ke •uasan •en elen,t:araan .elatihan di PKP2A I LAN
5	Jumlah Badan Diklat yang dibina
6	<u>Jumlah Widyaiswara yang mendapat •embinaan</u>
7	Jumlah ASN an: dinilai kom •etensin a
	<u>J u m l a h i n o v a s i a d m i n i s t r a s i n e g a r a</u>
9	Jumlah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang memanfaatkan inovasi administrasi ne:ara LAN

25. Indikator Kinerja Utama Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II LAN

No.	Indikator Kinerja Utama
1	Jumlah rekomendasi kebi'akan an men'adi wacana ublik
2	Jumlah karya ilmiah di bidang Administrasi Negara yang terpublikasi di media ilmiah/publikasi nasional/internasional
3	Persentase alumni diklat kepemimpinan yang menerapkan <u>i n o v a s i l p r o y e k p e r u b a h a n</u>
4	Indeks i(e-iPyglasagn Pen e'en ailar an elatihan di PKP2A II LAN
5	Jumlah Badan Diklat yang dibina
6	Jumlah Widyaiswara yang mendapat pembinaan
7	Jumlah inovasi Administrasi Negara
8	Jumlah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang memanfaatkan inovasi administrasi negara LAN

26. Indikator Kinerja Utama Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III LAN

No.	Indikator Kinerja Utama
1	Jumlah rekomendasi kebfakan an men'adi wacana ublik
2	Persentase alumni Diklat Kepemimpinan yang menerapkan inovasi/proyek perubahan
	ar an elatihan di PKP2A III LAN
4	Jumlah Badan Diklat yang dibina
5	Jumlah Wid aiswara an menda atpembinaan
6	Jumlah karya tulis di bidang Administrasi Negara yang terpublikasi di media ilmiah •ublikasi nasional internasional
7	Jumlah inovasi Administrasi Negara
	Jumlah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang

27. Indikator Kinerja Utama Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur IV LAN

No.	Indikator Kinerja Utama
1	Jumlah Rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik
2	Jumlah karya ilmiah di bidang Administrasi Negara yang terpublikasi di media ilmiah publikasi nasional internasional
3	Persentase alumni Diklat Kepemimpinan yang menerapkan inovasi/proyek perubahan
	<u>J u m l a h B a d a n D i k l a t y a n g d i b i n a</u>
5	Jumlah Widyaiswara an: menda slat pembinaan
	Indeks kepuasan pelayanan penyelenggaraan diklat
7	Jumlah inovasi administrasi negara
8	Jumlah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang memanfaatkan inovasi administrasi negara LAN

28. Indikator Kinerja Utama Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) LAN
Jakarta

No.	Indikator Kinerja Utama
1	Persentase lulusan Si pada STIA LAN Jakarta dengan IPK minimal 3,00 dengan masa studi kurang dari 70% masa studi maksimal
2	Persentase lulusan S2 pada STIA LAN Jakarta dengan IPK minimal 3,25 dengan masa studi kurang dari 70% masa studi maksimal
3	Persentase instansi pengirim mahasiswa yang puas terhadap kualitas lulusan STIA LAN Jakarta
	Jumlah karya ilmiah di bidang Administrasi Negara yang terpublikasi di media ilmiah/publikasi nasional internasional
	Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di STIA LAN Jakarta
6	Persentase dosen yang telah tersertifikasi
7	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan STIA LAN Jakarta

29. Indikator Kinerja Utama Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) LAN
Bandung

No.	Indikator Kinerja Utama
1	Persentase lulusan Si pada STIA LAN Bandung dengan IPK minimal 3,00 dengan masa studi kurang dari 70% masa studi maksimal
2	Persentase lulusan S2 pada STIA LAN Bandung dengan IPK minimal 3,25 dengan masa studi kurang dari 70% masa studi maksimal
3	Persentase instansi pengirim mahasiswa yang puas terhadap kualitas lulusan STIA LAN Bandung
	Jumlah karya ilmiah di bidang Administrasi Negara yang terpublikasi di media ilmiah publikasi nasional internasional
5	Jumlah penelitian yang dilakukan di STIA LAN Bandung
6	Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di STIA LAN Bandung
7	Persentase dari jumlah dosen tetap pada STIA LAN Bandung yang telah tersertifikasi

30.Indikator Kinerja Utama Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) LAN
Makassar

No.	Indikator Kinerja Utama
1	Persentase lulusan S1 pada STIA LAN Makassar dengan IPK minimal 3,00 dengan masa studi kurang dari 70% masa studi maksimal
2	Persentase lulusan S2 pada STIA LAN Makassar dengan IPK minimal 3,25 dengan masa studi kurang dari 70% masa studi maksimal
3	Persentase instansi pengirim mahasiswa yang puas terhadap kualitas lulusan STIA LAN Makassar
	Jumlah karya ilmiah di bidang Administrasi Negara yang to •ublikasi di media ilmiah •ublikasi nasional internasional
5	Jumlah penelitian yang dilakukan di STIA LAN Makassar
	Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di STIA LAN Makassar
6	Persentase dari jumlah Dosen tetap pada STIA LAN Makassar yang telah tersertifikasi
	Indeks Ke uasan Pengguna La anan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2015

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

AGUS DWIYANTO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



RUSMA DWIYANA